

Harapan Rakyat Terhadap Kualitas Pimpinan Nasional Hasil Pemilu 2014

Adi Sujatno

PENDAHULUAN

Tema kepemimpinan merupakan topik yang selalu menarik untuk diperbincangkan dan tak akan pernah habis untuk dibahas. Masalah kepemimpinan akan selalu hidup dan akan digali pada setiap zaman, dari generasi ke generasi guna mencari formulasi sistem kepemimpinan yang aktual dan tepat untuk diterapkan pada zamannya. Hal ini mengindikasikan bahwa paradigma kepemimpinan adalah sesuatu yang sangat dinamis, urgen, dan memiliki kompleksitas yang tinggi. Paradigma kepemimpinan ini juga diperkuat oleh suatu pendapat yang ditulis Graen (1976) dan Cashman (1975) yang menyatakan bahwa kepemimpinan sebagai suatu *proses* di mana individu belajar tentang posisinya dari waktu ke waktu dan beradaptasi serta memperoleh pengetahuan pada pekerjaan sebagai suatu pengalaman. (Dubisky, Yammarino, dan Jolson (1995).

suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang terlahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial (*zoon politicon*) yang sangat tinggi dalam memenuhi berbagai kebutuhannya (homo sapiens). Abraham Maslow mengidentifikasi 5 (lima) tingkatan kebutuhan manusia: 1) kebutuhan biologis; 2) kebutuhan akan rasa aman; 3) kebutuhan untuk diterima dan dihormati orang lain; 4) kebutuhan untuk mempunyai citra yang baik; dan 5) kebutuhan untuk menunjukkan prestasi yang baik.

Dalam upaya memenuhi kebutuhannya tersebut, manusia kemudian menyusun organisasi dari yang terkecil sampai terbesar sebagai medianya serta menjaga berbagai kepentingannya. Bermula dari hanya sebuah kelompok, berkembang hingga menjadi suatu bangsa. Dalam konteks inilah, sebagaimana dikatakan Plato dalam filsafat negara, lahir istilah kontrak sosial dan pemimpin atau kepemimpinan.

Terminologi kepemimpinan lahir sebagai

Oleh karenanya, dalam catatan sejarah

nusantara mulai dari masa kerajaan hingga masa republik, dikenal beberapa gaya kepemimpinan seperti: Gaya Kepemimpinan Patih Gajahmada; R. Ng. Ronggowarsito; Ir. Soekarno; Jenderal Soedirman; serta Jenderal Soeharto, BJ. Habibi, Gusdur, Megawati, SBY; Yang menarik dari para tokoh tersebut adalah karakter kepemimpinan mereka masing-masing yang memiliki ciri khas dan menjadi sesuatu yang fenomenal di masanya. Hal ini disebabkan gaya kepemimpinan mereka yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi zaman yang sedang dihadapi, sehingga kepemimpinannya menjadi hal yang dibutuhkan oleh zaman dan masanya. Morcel Beding yang menyatakan bahwa: "Eksistensi seorang pemimpin lebih dari sekedar atribut pribadi dan watak yang dapat dibiarkan ke dalam spektrum sifat-sifat kepemimpinan. Ia juga merupakan suatu peranan yang ditentukan oleh harapan-harapan kelompok, lembaga, dan organisasi"

Konsep atau definisi mengenai kepemimpinan sangatlah banyak. Menurut Glenn, pada tahun 1992 terdapat \pm 350 definisi mengenai kepemimpinan. Dari sekian banyak definisi kepemimpinan hanya ada 3(tiga) golongan yaitu: (1) kepemimpinan sebagai pusat proses dan gerakan kelompok; (2) kepemimpinan sebagai seni mempengaruhi; (3) kepemimpinan sebagai pembedaan kekuasaan, diferensiasi peranan, dan inisiasi struktur (Stogdill RM, dalam bukunya "*Handbook of Leadership*", 1974).

Oleh karenanya, tidak ada satu definisi kepemimpinan pun dapat dirumuskan secara sangat lengkap untuk mengabstraksikan perilaku sosial atau perilaku interaktif manusia di dalam organisasi yang memiliki regulasi dan struktur tertentu, serta misi yang kompleks.

Diskursus tentang masalah Kepemimpinan (*Leadership*) dan Kenegarawan (*Statesmanship*) tidak mungkin dilakukan dalam ruang hampa. Kedua hal tersebut lahir sebagai suatu konsekuensi logis dari perilaku dan budaya manusia yang lahir sebagai individu yang memiliki ketergantungan sosial (Aristoteles: *Homo Sociologicusi Zoon Politicon*) yang sangat tinggi dalam mencapai tujuan bersama, memelihara tertib sosial dan memenuhi berbagai kebutuhannya (Homo Sapiens). Dalam kerangka pemenuhan kebutuhan tersebut, utamanya dalam kerangka kehidupan sosial yang semakin kompleks, manusia tidak mungkin berdiri sendiri, tetapi membutuhkan kerjasama dalam bentuk organisasi dari yang terkecil sampai dengan yang terbesar dan canggih. Mulai dari hanya sebuah kelompok, berkembang hingga menjadi suatu bangsa.

Pada akhir terjadinya reformasi sekarang ini muncul fenomena yang mengindikasikan mengenai telah terjadi aksi "*social distrust*" di beberapa daerah dan di beberapa kampus, yang ditandai dengan sering terjadinya penolakan-penolakan

atau resistensi terhadap kebijakan apapun yang diputuskan oleh pemerintah. Lebih dari itu, para pelaku telah berani bersikap menolak kehadiran para pemimpinnya, bahkan penolakan tersebut disertai dengan berbagai teriakan kotor, kerusuhan, dan perlakuan anarkhis.

Sebagai respons terhadap permasalahan tersebut, secara jujur harus diakui bahwa situasi dan kondisi kehidupan berbangsa dan bernegara kini telah berkembang dan telah dicapai beberapa kemajuan penting.

Dalam organisasi inilah muncul tokoh-tokoh pemimpin dan kepemimpinan yang tidak lahir secara serta merta, melainkan melalui suatu proses, yang pada akhirnya memunculkan teori-teori kepemimpinan dan bahkan kenegarawanan. Dalam hal ini sering kita sebut "*Strong Reciprocity*" merupakan suatu kecenderungan (*Pre-disposition*) untuk bekerjasama satu sama lain.

Dalam kerangka kehidupan kenegarawan, seorang pemimpin nasional di Indonesia akan dihadapkan kepada permasalahan yang sangat kompleks. Pada dasarnya tidak akan terlepas dari Tujuan Nasional (Tunas) yang tersurat dan tersirat dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa,

dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Tentu saja dengan segala dinamikanya baik nasional, regional maupun internasional.

Beberapa permasalahan bangsa yang dimaksud, antara lain di bidang ekonomi mencakup masalah pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan, investasi negatif, hutang dalam negeri dan luar negeri, ketahanan pangan yang masih rentan, derajat kesehatan masyarakat yang relatif rendah serta anggaran dan kualitas pendidikan yang masih belum memadai. Di bidang politik ditandai dengan semakin maraknya KKN, permainan politik uang, ancaman terhadap ideologi Pancasila, tatanan politik yang belum baik, degradasi moral dan etika politik, serta penegakan hukum dan HAM yang masih lemah. Di bidang Hankam, masih rawannya ancaman bahaya disintegrasi, kriminalitas yang masih tinggi baik kualitas maupun kuantitasnya, meluasnya peredaran Narkoba serta penyelundupan dan perdagangan ilegal yang sulit diberantas.

Saat ini, kita masih menghadapi permasalahan-permasalahan yang fokus utamanya masih berpusar di sekitar bidang politik dan ekonomi, serta keamanan negara yang kondisinya masih rawan dan rentan terhadap ancaman terjadinya disintegrasi.

Sebagai gambaran bahwa Indonesia saat

ini terlibat mulai dari usaha untuk melakukan kebangkitan kembali dari krisis (*Crises Recovery*) multidimensional, pembentukan Asean Charter, sampai dengan pembaharuan PBB (*UN Reform*).

FILOSOFI MANUSIA & KEPEMIMPINAN

Berbicara mengenai Filosofi manusia dan kepemimpinan, pakar kepemimpinan dunia yang bernama Dale Carnegie dalam bukunya *"The Leader in You"* mengatakan, bahwa ada jiwa kepemimpinan di dalam setiap diri manusia. Hal ini juga diperkuat oleh pendapat seorang pakar dunia yang bernama Warren Bennis yang mengatakan bahwa: *"Seorang pemimpin berbeda dengan orang kebanyakan"* karena setiap orang memiliki kelebihan-kelebihan yang orang lain tidak memilikinya dan hal senada juga diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengku Buwono X yang mengatakan, bahwa *"Setiap kita sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Kekuatan terdahsyat seorang pemimpin adalah suri teladan (uswatun hasanah) dan kejujurannya (siddiq)."*

Dalam Alquran maupun Alkitab, telah dituliskan bahwa pada dasarnya manusia diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa adalah untuk memimpin dunia, memimpin alam semesta, dan memimpin jagad raya ini. Sehingga secara fitrah, sejak lahir kekhitahan kita sebagai manusia, telah diciptakan

bahwa, kita semua adalah pemimpin yang pada akhirnya manusia disebut sebagai khalifatullah di dunia

Mengenai perlu adanya pemimpin, telah ditandaskan oleh Rasulullah Muhammad SAW: *"Apabila berangkat tiga orang dalam perjalanan, maka hendaklah mereka mengangkat salah seorang di antaranya menjadi pemimpin"* (HR.Abu Dawud). Beberapa ayat Alquran juga banyak yang berkaitan dengan eksistensi pemimpin, di antaranya adalah: Q.S. Al-Baqarah: 124, Al-Anbiya: 72-73, Shad: 26, dan Al-An'am: 165.

Jika kita berbicara mengenai manusia, maka sebenarnya kita sedang membahas mengenai jiwa dan raga. WS Rendra berpendapat bahwa manusia adalah kesatuan roh dan badan, sehingga perbuatan yang penuh kesejatian adalah perbuatan yang mencerminkan kesatuan roh dan badan. Dengan demikian, kegiatan kepemimpinan merupakan kegiatan jasmani sekaligus rohani.

Dalam khasanah Jawa, perihal manusia dapat dikenal dari ajaran "HA NA, CA RA KA" yang menjelaskan hakekat manusia sebagai berikut:

- HA NA artinya ono yaitu ada.
Ha bermakna hidup,
Na bermakna nglegeno/wudho, yang berarti ada kehidupan yang masih suci; berarti pula kehidupan yang masih suci

bersih; belum ternoda oleh kesalahan dan dosa; fitrah; sejak kelahirannya manusia dalam kesucian/fitrah;

- CA RA KA artinya bekal manusia hidup di dunia;
Ca Bermakna cipto, (cipta),
Ra bermakna roso (rasa),
Ka bermakna karso (kehendak), yang berarti bahwa dalam kehidupan manusia, senantiasa sangat dipengaruhi oleh daya cipta, daya rasa dan daya karsa /kehendak/keinginan/keinginan untuk mewujudkan kehidupan yang bermakna dan penuh kemuliaan (R.A. Koesnoen, Politik Pendjara Nasional).
- DATA SA WA LA artinya akal yang tidak cacat; gambaran hidup manusia yang baru lahir.
- PA DHA JA YA NYA artinya sama saktinya, sama digdayanya, sama kekuatannya
- MA GA BA THA NGA artinya
MA bermakna sebagai sukmo (sukma),
GA bermakna sebagai rogo (raga)
BA+THA bermakna sebagai bathang (bangkai),
NGA bermakna sebagai lungo (pergi),

yang berarti berpisahny sang sukma dari raga/tubuh, raga/tubuh menjadi bangkai yang ditanam di dalam tanah, dan sang

sukma pergi meninggalkan sang raga/tubuh untuk menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa guna mempertanggung jawabkan hasil kepemimpinannya /pekerjaannya. Sehingga arti secara keseluruhan dari makna tersebut diatas adalah: Bahwa manusia dilahirkan ke dunia dalam kondisi telanjang (tidak memakai baju), dan manusia diberikan oleh Tuhan berupa daya cipta, daya rasa, dan daya karya/karsa dan kemudia di dalam perjalanan hidupnya ada utusan (duta) yang membawa surat; yang sama-sama saktinya atau kuatnya; keduanya saling berperang atau berkelahi; karena sama-sama kuatnya; keduanya meninggal dunia; yang raga menjadi bangkai, sukma mereka pergi menghadap kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Itulah selintas gambaran perjalanan hidup manusia, sejak kelahirannya sampai menghadap kembali kepada yang Maha Pencipta. Salah satu makna memperingati suatu kelahiran manusia hingga mendapatkan kehidupan di dunia, hingga meninggalkan dunia, dan berakhir mempertanggung jawabkan hasil kehidupannya. Hal ini juga diperjelas dengan sabda Rasullallah Muhammad saw. yang artinya *"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas hasil kepemimpinannya"*. (H.R. Imam Bukhari Muslim).

Ibnu Umar berkata, Rasulullah saw. bersabda, "Kalian semua adalah penggembala

dan bertanggung jawab atas gembalaannya. Pemimpin adalah penggembala rakyatnya dan bertanggung jawab atas mereka. Istri adalah penggembala dan bertanggung jawab atas rumah tangga suaminya. Dan, pembantu adalah penggembala dan bertanggung jawab atas harta tuannya." (HR. Al-Bukhari).¹

Abu Hatim Rahimahullah berkata, "Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa setiap penggembala bertanggung jawab atas gembalaannya, sehingga dia wajib selalu mengawasinya. Penggembala umat manusia adalah ulama, penggembala penguasa adalah akal, penggembala orang-orang saleh adalah ketakwaan, penggembala pelajar adalah guru, penggembala anak adalah orang tuanya, penggembala istri adalah suaminya, penggembala budak adalah tuannya. Masing-masing penggembala itu bertanggung jawab atas gembalaannya."²

Pepatah tua mengatakan, "Jika engkau ingin memimpinku, berdirilah di depanku". Filosofi kepemimpinan dalam agama Islam, dikatakan bahwa kepemimpinan bukanlah suatu tujuan (*final-goal*), bukan kenikmatan, dan juga bukan fasilitas tetapi sebagai perantara untuk mewujudkan terciptanya keadilan masyarakat. Pemahaman yang demikian itu, dalam pandangan Islam hanya dapat diwujudkan oleh seorang pemimpin

atau imam yang adil.

Dalam pandangan Islam, memahami manusia merupakan salah satu jalan penting untuk mengenal hakikat dan syariat Tuhan, karena hakikat itu sendiri adalah proses pengenalan Tuhan dan alam semesta dengan melihat ke dalam diri manusia (*Man Arafah Nafsuha Faqodah Arafah Rabbahu*) "Kenalilah dirimu, maka engkau akan mengenal Tuhanmu". Rasulullah bersabda: "Barang siapa mengenal dirinya, maka ia mengenal Tuhannya". Oleh karena itu tidak heran apabila salah satu tokoh sufistik paling berpengaruh dalam peradaban Islam, Jalaluddin Rumi dalam bukunya "Yang Mengetahui Dirinya, Mengetahui Tuhannya (*fih ma fih*)" yang berisi puisi-puisi sufistik mengenai kedalaman makna yang dapat dipetik dari pengenalan terhadap dirinya (*baca: manusia*). Dalam Islam, Tuhan dimaknai sebagai sesuatu yang bersifat:

- Transenden, yaitu "Dengan rupa apa pun engkau membayangkan Tuhan, Dia tetap berbeda dari bayanganmu".
- Immanen, yaitu "Selalu ada di dalam semua ciptaan-Nya. Sehingga pengenalan terhadap Tuhan ada pada diri manusia itu sendiri.

Kepemimpinan merupakan sebuah fenomena universal. Siapa pun yang menjalankan tugas-tugas kepemimpinan, dia akan berinteraksi dengan orang lain. Bahkan

1 Hadist no. 853

2 *Raudah Al-Uqalaa Wa Nazhah Al-Fudhalaa*, hlm. 222,

dalam kapasitas pribadi pun, di dalam tubuh manusia itu ada kapasitas atau potensi pengendali, yang pada intinya memfasilitasi seseorang untuk dapat menjadi dirinya sendiri.

Dalam hal ini juga diperkuat dengan pendapat seorang pakar dunia yang bernama Warren Bennis di dalam buku karangan Andreas Harefa yang berjudul *Menjadi Manusia Pembelajar*, bahwa pengetahuan/pengenalan diri seseorang adalah:

- Anda adalah guru terbaik bagi diri Anda sendiri
- Terimalah tanggung jawab. Jangan menyalahkan siapapun
- Anda dapat belajar apa pun yang ingin Anda pelajari
- Pengertian yang benar berasal dari pencerminan dalam pengalaman Anda.

Menurut Ibnu Taimiyah syarat tegaknya sebuah negara akan terwujud apabila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: 1. Ilmunya seorang ulama; 2. Pemimpin yang adil; 3. Pedagang/Pengusaha yang jujur; 4. Masyarakat/rakyat yang patuh; dan 5. Pegawai yang disiplin.

Dalam bukunya yang berjudul *Lead Like Jesus* (Ken Blanchard and Phil Hodges) yang ditulis oleh Rick Warren, seorang penulis *The Prophet Driven Life* mengatakan, bahwa ada 4 (empat) bidang penting dalam diri manusia dan bagaimana mereka membantu

membawa Anda menjadi pemimpin yang luar biasa. Ke-empat bidang itu mencakup: (1) Hati, (2) Kepala, (3) Tangan, dan (4) Kebiasaan. Sebaliknya, "*Yesus menunjukkan model kepemimpinan yang melayani, memimpin dengan teladan hidup*". Dia berkata, "*Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayanan*". Dialah satu-satunya teladan yang sempurna. (Rick Warren, Penulis *The Prophet Driven Life*, dikenal sebagai salah seorang dari "25 Pemimpin terbaik di AS"). Di dalam Kitab Suci versi King James menyebut kata *pemimpin* sebanyak enam kali sedangkan kata *pelayanan* disebut sebanyak sembilan ratus kali.

Pada ajaran Buddha masalah kepemimpinan ditampilkan dalam falsafah Dhamma pada uraian Thakada. Di sana diuraikan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi "Sepuluh Kewajiban Raja" (Dasa Raja Dhamma) yang terdiri dari: Dhana (*suka menolong, tidak kikir dan ramah tamah*), Sila (*bermoralitas tinggi*), Paricaga (*mengorbankan segala sesuatu demi rakyat*), Ajjava (*jujur dan bersih*), Maddava (*ramah tamah dan sopan santun*), Tapa (*sederhana dalam penghidupan*), Akkhoda (*bebas dari kebencian dan permusuhan*), Avihimsa (*tanpa kekerasan*), Khanti (*sabar, rendah hati, dan pemaaf*), Avirodha (*tidak menentang dan tidak menghalang-halangi*).

Pada ajaran Hindu, falsafah kepemimpinan dijelaskan dengan istilah-istilah yang me-

narik dan memiliki makna yang mendalam, seperti: Panca Stiti Dharmeng Prabhu (*lima ajaran seorang pemimpin*), Catur Kotamaning Nrepati (*empat sifat utama seorang pemimpin*), Asta Brata (*delapan sifat mulia para dewa*), Catur Naya Sandhi (*empat tindakan seorang pemimpin*).

Dalam *Catur Naya Shandi* diterangkan, bahwa seorang pemimpin hendaknya melaksanakan empat hal, yaitu: Sama (*menandingi kekuatan musuh*), Bheda (*melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja*), Dhana (*mengutamakan sandang dan papan untuk rakyat*), Dandha (*menghukum dengan adil mereka yang bersalah*). Ajaran Hindu juga mengajarkan pantangan/larangan bagi seorang pemimpin yang diistilahkan Molimo (lima me): • Memotoh (*main judi*); • Metuakan (*minum-minuman keras*); • Memati-mati (*membunuh*); Memadat; • Memitra/Madon (*selingkuh*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sesungguhnya letak strategis seorang pemimpin dan kepemimpinan pada kepribadian dan kecerdasan akal budinya. Ada beberapa peran seorang pemimpin dan kepemimpinannya, antara lain: seorang pemimpin mempunyai peran/tugas untuk mempengaruhi, mengajak, menggerakkan, mengambil keputusan dan harus siap menjadi figur, teladan, contoh, panutan dari seluruh orang-orang yang dipimpinya serta lingkungan masyarakatnya.

TANTANGAN GLOBAL KEPEMIMPINAN NASIONAL

Era globalisasi saat ini ditandai dengan munculnya revolusi Triple T (3T) yang mengancam dunia tidak hanya di Indonesia, yaitu *Transportation, Telecommunication dan Travel/Tourism*. Hubungan antarpribadi dan antarkelompok sudah sedemikian dekat sehingga batas-batas antarwilayah menjadi kabur (*borderless area*). Kejadian yang berlangsung di suatu wilayah tertentu dapat dilihat atau dideteksi di wilayah lain dalam hitungan detik.

Sehubungan dengan era global tersebut, mantan Sekretaris Jenderal PBB Kofi Annan mengidentifikasi adanya 6 kelompok ancaman atau bahaya secara global (*six clusters of threats*) yang dihadapi oleh bangsa-bangsa di dunia saat ini, yaitu:

- Ancaman sosial dan ekonomi, termasuk kemiskinan, penyakit menular dan kerusakan lingkungan;
- Konflik antarnegara;
- Konflik internal, termasuk perang saudara, genosida dan kekejaman berskala besar lainnya;
- Senjata nuklir, radiologi, kimia dan biologi;
- Terorisme; dan
- Kejahatan lintas negara yang terorganisir.

Di sisi lain, pembangunan nasional negara-negara berkembang secara tajam dan komprehensif tergambar dalam *The Millenium Development Goals* (MDGs) tahun 2005 yang oleh Kofi Annan disebut sebagai "*An Unprecedented Promise by World Leaders to Address, As a single package, Peace Security, Development, Human Rights and Fundamental Freedom*" dengan target waktu sampai dengan tahun 2015.

MDGs berbeda dengan program-program lain yang semacam, karena karakternya yang "*People-Centered, Time Bound and Measurable*"; didasarkan atas "*A Global Partnership*", yang menekankan pada tanggung jawab negara berkembang untuk mengurus rumah tangganya sendiri dan negara maju untuk membantu usaha-usaha yang dilakukan. MDGs melibatkan dukungan politik tingkat tertinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, baik di negara-negara maju maupun berkembang, *Civil Society* dan lembaga-lembaga pembangunan utama lainnya; serta prediksi bahwa hal tersebut bisa dicapai (*Achievable*). MDGs mencakup 8 langkah sebagai berikut:

- Menanggulangi Kemiskinan;
- Mencapai Pendidikan Dasar Untuk Semua;
- Mendorong Kesetaraan Gender & Pemberdayaan Perempuan;
- Menurunkan Angka Kematian Anak;
- Meningkatkan Kesehatan Ibu;
- Memerangi HIV/AIDS, Malaria dan

- Penyakit Lainnya;
- Memastikan Kelestarian Lingkungan Hidup;
- Membangun Kemitraan Global;
- Untuk Pembangunan.

Sejalan dengan MDG's tersebut, pembangunan nasional pada dasarnya merupakan usaha untuk membangun peradaban (*Civilization Development*) yang secara keseluruhan merupakan usaha untuk meningkatkan "*Human & National Capabilities*"; yang mencakup tidak hanya tinggi rendahnya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita tetapi secara komprehensif mencakup pula kualitas dan kuantitas penduduk; kemajuan sains dan teknologi; tingkat korupsi dan tingkat pengangguran; daya tarik bagi penanaman modal asing; kualitas infrastruktur; stabilitas ideologi dan politik; keamanan nasional; jumlah orang yang hidup di bawah garis kemiskinan; jumlah hutang nasional; dan kemampuan bangsa untuk mengembangkan keunggulan komparatif dan kompetitif di era globalisasi. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi hanya merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan peradaban.

Di samping permasalahan yang harus dihadapi, Indonesia masih memiliki permasalahan spesifik seperti kepeloporan di negara-negara Asean, Non-Blok dan OKI; gerakan radikalisme yang merupakan akar (*root causes*) terorisme; masyarakat yang

masih terbebani usaha untuk menciptakan "*Constructive Pluralism*"; gerakan separatisme di Papua; Krisis ekonomi yang belum pulih; proses reformasi/demokratisasi yang belum selesai (Penegakan Indeks Demokrasi berupa: prinsip-prinsip konstitualisme, *Good Governance*, *Freedom of The media*, *Independence of Judiciary*, *Civilian Control to the Millitary*, Otonomi Daerah, Pemilu yang *Free dan Fair*, *System Checks and Balances*, Penghargaan Terhadap Kelompok Kepentingan, *Public's Rights to Know*, Perlindungan Kelompok Minoritas, Hukum yang aspiratif, Promosi dan Perlindungan HAM); Belum lagi usaha untuk menegakkan kembali wibawa ideologi Pancasila sebagai "*Margin of Appreciation*" bangsa; Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Perubahan Sosial (*Social Change*) yang cepat, akibat kemajuan teknologi informatika, serta komunikasi dan transportasi yang merupakan tantangan tersendiri.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam salah satu orasi ilmiahnya (pada acara Reuni Akbar Alumni IKAL, Lemhannas RI) merumuskan tantangan bagi bangsa Indonesia saat ini dibagi dalam 9 kelompok yang meliputi:

- Ideologi & kerangka bernegara
- Politik & Demokrasi
- Ekonomi & Keadilan Sosial
- Hukum & Pemerintahan
- Persatuan & Desentralisasi
- Stabilitas & Keamanan Dalam Negeri

- Pertahanan & Politik Luar Negeri
- Budaya & Teknologi
- Pembangunan Berkelanjutan.

KUALITAS PIMNAS YANG DIHARAPKAN, NEGARAWAN & INDEKS KEPEMIMPINAN NASIONAL INDONESIA

Sejalan dengan kondisi bangsa kita saat ini, guna memberikan solusi politik atau jalan keluar maka dibuat dalam bentuk *Resque Program* (jalan alternatif untuk menyelamatkan bangsa) sebagai langkah strategis untuk mengatasi beberapa permasalahan aktual dimaksud.

Untuk melaksanakan *resque program* dan langkah strategis yang *feasible, applicable* dan *workable* dalam rangka membangun bangsa ini menjadi bangsa besar dituntut adanya "*strong leadership*" yang mampu berperan sebagai: *solidarity maker* dan *administrator maker* yang baik, komunikatif, bersih dan berani bersikap tegas, mempunyai visi ke depan, serta memiliki kharisma yang dihormati dan disegani rakyat.

Hal ini juga diperjelas dengan sabda Rasulullah Muhammad SAW yang artinya "*Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas hasil kepemimpinannya*". (H.R. Imam Bukhari Muslim).

Menurut Ibnu Taimiyah syarat tegaknya

sebuah negara akan terwujud apabila didukung oleh beberapa faktor, di antaranya adalah: 1. Ilmunya seorang ulama; 2. Pemimpin yang adil; 3. Pedagang/Pengusaha yang jujur; 4. Masyarakat/rakyat yang patuh; dan 5. Pegawai yang disiplin.

Pada ajaran Nasrani di dalam bukunya yang berjudul *Lead Like Jesus (Ken Blanchard and Phil Hodges)* yang di tulis oleh Rick Warren, seorang penulis *The Prophet Driven Life* mengatakan, bahwa ada 4 (empat) bidang penting dalam diri manusia dan bagaimana mereka membantu membawa Anda menjadi pemimpin yang luar biasa. Keempat bidang itu mencakup: • Hati, • Kepala, • Tangan, dan • Kebiasaan. Sebaliknya, "Yesus menunjukkan model kepemimpinan yang melayani, memimpin dengan teladan hidup". Dia berkata, "Aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayanan". Dialah satu-satunya teladan yang sempurna. (Rick Wanen, Penulis *The Prophet Driven Life*, dikenal sebagai salah seorang dari "25 Pemimpin terbaik di AS). Di dalam Kitab Suci versi King James menyebut kata *pemimpin* sebanyak enam kali sedangkan kata *pelayanan* disebut sebanyak sembilan ratus kali.

Pada ajaran Buddha masalah kepemimpinan ditampilkan dalam falsafah Dhamma pada uraian Thakada. Di sana diuraikan bahwa kepemimpinan yang baik adalah kepemimpinan yang memenuhi "Sepuluh Kewajiban Raja" (Dasa Raja Dhamma) yang terdiri dari: Dhana (*suka menolong, tidak*

kikir dan ramah tamah), Sila (*bermoralitas tinggi*), Paricaga (*mengorbankan segala sesuatu demi rakyat*), Ajjava (*jujur dan bersih*), Maddava (*ramah tamah dan sopan santun*), Tapa (*sederhana dalam penghidupan*), Akkhoda (*bebas dari kebencian dan permusuhan*), Avihimsa (*tanpa kekerasan*), Khanti (*sabar, rendah hati, dan pemaaf*), Avirodha (*tidak menentang dan tidak menghalang-halangi*).

Pada ajaran Hindu, falsafah kepemimpinan dijelaskan dengan istilah-istilan yang menarik dan memiliki makna yang mendalam, seperti: Panca Stiti Dharmeng Prabhu (*lima ajaran seorang pemimpin*), Catur Kotamaning Nrepati (*empat sifat utama seorang pemimpin*), Asta Brata (*delapan sifat mulia para dewa*), Catur Naya Sandhi (*empat tindakan seorang pemimpin*).

Dalam *Catur Naya Shandi* diterangkan, bahwa seorang pemimpin hendaknya melaksanakan empat hal, yaitu: Sarna (*menandingi kekuatan musuh*), Bheda (*melaksanakan tata tertib dan disiplin kerja*), Dhana (*mengutamakan sandang dan papan untuk rakyat*), Oandha (*menghukum dengan adil mereka yang bersalah*). Ajaran Hindu juga mengajarkan pantangan/larangan bagi seorang pemimpin yang diistilahkan Molimo (lima me): • Memotoh (*main judi*), • Metuakan (*minum-minuman keras*), • Memati-mati (*membunuh*), 4) Memadat, • Memitra/Madon (*selingkuh*).

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sesungguhnya letak strategis seorang pemimpin dan kepemimpinan pada kepribadian dan kecerdasan akal budinya. Ada beberapa peran seorang pemimpin dan kepemimpinannya, antara lain: seorang pemimpin mempunyai peran tugas untuk mempengaruhi, mengajak, menggerakkan, mengambil keputusan dan harus siap menjadi figur, teladan, contoh, panutan dari seluruh orang-orang yang dipimpinnya serta lingkungan masyarakatnya.

Pada gilirannya hal ini juga dimaksudkan sebagai upaya mewujudkan rekonsiliasi nasional guna mengharmonisasikan situasi dan kondisi masa lalu dengan masa sekarang serta mengharmonisasikan semua aspek-aspek kehidupan nasional.

Sejatinya, pemilu adalah media bagi rakyat untuk mendapatkan sosok kepemimpinan yang representatif bagi bangsanya. Oleh karena itu Pemilu merupakan agenda yang sangat penting dalam upaya mendapatkan sosok Pemimpin Nasional yang berkualitas. Untuk itu kecerdasan rakyat dalam menentukan pilihan sangat dibutuhkan, sehingga pada akhirnya rakyat tidak salah memilih pemimpinnya.

Sekarang ini dan ke depan Indonesia memerlukan pemimpin dan kepemimpinan yang kuat untuk menyelesaikan berbagai permasalahan bangsa. Sosok Pemimpin Nasional yang kuat terdiri dari tiga (3)

kriteria sebagai berikut:

1. Sosok PIMNAS yang dipercaya dan diterima masyarakat (*social trust*).

Hubungan yang erat antara pemimpin dan yang dipimpin merupakan syarat utama bagi tercapainya tujuan kepemimpinan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pemimpin akan dapat melaksanakan fungsi kepemimpinannya dengan efektif apabila ia diterima, dipercaya, didukung serta dapat diandalkan. Agar dapat memperoleh kepercayaan rakyat, untuk itu seorang pemimpin harus memiliki reputasi yang baik, kinerja yang optimal terutama dalam mengantisipasi tantangan ke depan dan keberhasilannya mengatasi berbagai permasalahan krusial serta membawa kemajuan yang dirasakan langsung oleh rakyat.

Selain mendapat kepercayaan dari rakyat, kehidupan berbangsa akan semakin mantap bila dipimpin oleh sosok kepemimpinan yang tingkat resistensinya rendah serta memiliki integritas dan kualitas kepemimpinan yang teruji. Sosok kepemimpinan yang memiliki resistensi yang rendah dapat dilihat dari kualitas-kualitas sebagai berikut:

- Dikenal luas oleh sebagian besar rakyat.
- Dikenal memiliki karakter dan ke-

pribadian yang baik.

- Mampu membangkitkan rasa optimisme dan motivasi rakyatnya.
- Dikenal memiliki orientasi pengabdian dan dedikasi.
- Mampu menangani konflik secara bijak dengan ketabahan dan kearifan yang tinggi.
- Mampu berinteraksi dan berkomunikasi secara luas dengan berbagai elemen dan lapisan masyarakat.
- Memiliki wawasan dan pemahaman yang luas mengenai masalah ideologi, politik, sosial, budaya, hankam, serta hubungan antar bangsa.
- Memiliki "track record" yang baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- Tidak diragukan integritas dan kesetiiaannya kepada NKRI, Pancasila dan UUD 1945, serta memiliki komitmen yang kuat terhadap kepentingan bangsa.

2. Sosok PIMNAS yang konsisten, tegas dan tidak ambivalen.

Agar upaya pencapaian cita-cita dan tujuan nasional dapat dicapai dengan efektif dan efisien, diperlukan sosok individu atau pribadi pemimpin yang memiliki kemampuan *leadership* yang mapan, antara lain selalu konsisten, tegas dan tidak ambivalen, disiplin serta konsekuen dalam pengambilan keputusan.

Pemimpin yang diinginkan rakyat adalah pemimpin yang tegas, berani karena benar, benar karena menurut hukum. Pemimpin yang demikian itu adalah pemimpin yang kuat karakternya, yang tidak ragu untuk membenarkan dan menyalahkan, tidak ambivalen.

Sosok PIMNAS yang konsisten, tegas dan tidak ambivalen merupakan cerminan dari sifat wajib para nabi yang patut diteladani, yaitu: Siddiq, Amanah, Tabligh, Fathonah. Pemimpin yang memiliki sifat Siddiq adalah pemimpin yang memiliki kejujuran dan kebenaran. Ia tegas dalam menyatakan pendapatnya secara benar, tulus dan jelas sesuai dengan kenyataan. Seorang pemimpin dituntut untuk jujur tata pikimya, jujur tata bicaranya, jujur tata lakunya dan jujur pula tujuannya.

Pemimpin yang memiliki sifat Amanah adalah sosok pemimpin yang mampu melaksanakan segenap tanggung jawab yang dipercayakan kepadanya, termasuk di dalamnya dalam hal pengelolaan keuangan negara. Ia menyakini bahwa jabatan dan kekuasaan merupakan amanah rakyat dan Tuhan yang akan dimintakan pertanggungjawabannya, sehingga ia konsisten terhadap visi, misi dan kontrak sosial yang dibebankan kepadanya. Pada gilirannya ia akan menjalankan amanah tersebut dengan sungguh-sungguh untuk mencapai ke-

pemimpinan yang produktif (berdaya guna dan berhasil guna).

Pemimpin yang memiliki sifat *Tabligh* adalah sosok pemimpin yang mahir dalam mensosialisasikan kebijakan-kebijakannya dan memiliki kemampuan dalam pergaulan internasional secara baik dan benar.

Pemimpin yang memiliki sifat *Fathonah* adalah sosok pemimpin memiliki kecerdasan intelektual dan profesionalisme. Pemimpin yang memiliki keluasan ilmu akan mengantarkannya menjadi pemimpin yang bijaksana dalam mengambil keputusan, toleran terhadap perbedaan serta cerdas dan tangkas dalam mengatasi dan mengantisipasi berbagai gejolak yang muncul dalam masyarakat sehingga ia tidak ambivalen dalam mengeluarkan suatu kebijakan.

3. Sosok PIMNAS yang memiliki kecerdasan intelektual (*intellectual quality*), emosional (*emossional quality*) & spiritual (*spiritual quality*)

Sebagai seorang negarawan, pemimpin dituntut untuk mampu berfikir, bersikap dan bertindak visioner dalam rangka mengatasi masa-masa sulit. Disamping itu, ia dituntut mempunyai kemampuan untuk memilih prioritas sasaran pembangunan, serta memimpin negara agar tetap tegak dan kokoh menuju

tercapainya cita-cita dan tujuan nasional. Tindakan cerdas seorang pemimpin nasional sangat diperlukan agar mampu mengantisipasi dan menyikapi perkembangan lingkungan strategis, baik global, regional maupun nasional, sehingga nasib bangsa dan negara tidak terombang ambing dalam ketidakpastian.

Selain memiliki kecerdasan intelektual, seorang pemimpin juga harus memiliki kecerdasan emosional. Kesalahan pemimpin dalam membaca dan menterjemahkan emosi lawan bicara, termasuk emosi rakyat, dapat berakibat fatal dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang strategis. Berbagai fungsi yang melekat pada pribadi seorang pemimpin jelas memerlukan kecerdasan emosional, sehingga mampu mengorganisasikan orang lain serta mampu membuat keputusan besar yang berdimensi nasional, regional dan global secara cepat, tepat dan benar.

Di samping kedua kecerdasan di atas, dan tak kalah pentingnya adalah, seorang pemimpin harus memiliki kecerdasan spiritual. Bila seorang pemimpin terus mengasah kecerdasan spiritualnya dengan cara keluar sejauh mungkin dari jebakan-jebakan keduniaan, maka Insya Allah si pemimpin itu dapat memiliki ketangguhan guna menghadapi masalah-masalah bangsa yang sudah

multi kompleks. Dan agar tidak terjerat ke dalam kepentingan-kepentingan dunia yang seringkali nista, pemimpin perlu mengasah kerohaniannya dengan mengamalkan ajaran-ajaran agama yang dianutnya secara benar.

Bagi seorang muslim misalnya, dengan memperbanyak amalan-amalan sunnat terutama shalat malam (*qiyamul lail*), selain tidak pernah meninggalkan amalan-amalan yang wajib. Selain itu, ia tidak pernah lupa bahwa ibadahnya, shalatnya, hidupnya dan matinya harus dipersembahkan hanya kepada Tuhan Seru Sekalian Alam.

a. Kepemimpinan Nasional Yang Integratif & Negarawan

Kepemimpinan Nasional Indonesia yang integratif harus memiliki pola pikir, pola sikap dan pola tindak sebagai negarawan. Seorang negarawan tidak perlu harus menduduki jabatan kenegaraan walaupun ia berada pada tatanan kehidupan kemasyarakatan maupun tatanan politik nasional yang harus memiliki sifat dan ciri kenegarawanan yaitu mengutamakan kepentingan negara dari pada kepentingan pribadi atau kepentingan golongan/kelompoknya. Negarawan diharapkan mampu mengubah kondisi saat ini melalui proses untuk menciptakan kondisi yang diharapkan dalam rangka mencapai tuju-

an nasional dan mewujudkan cita-cita nasional. Proses perubahan tersebut harus mengacu pada nilai-nilai Pancasila, UUD NRI 1945, wawasan nusantara, dan ketahanan nasional serta memperhatikan lingkungan strategis yang berpengaruh.

• Berfikir sebagai Negarawan

Berfikir sebagai negarawan memiliki ciri "SATRIA", yaitu mampu menyatukan kesatuan berfikir yang meliputi masa lalu, masa kini dan masa mendatang. Negarawan harus selalu berfikir agar masa kini lebih baik daripada masa lalu, masa mendatang lebih baik daripada masa kini. Landasan berfikir sebagai negarawan adalah:

- a) Pancasila sebagai falsafah, ideologi dan dasar negara
- b) UUD NRI 1945 sebagai Konstitusi Negara
- c) Karsa Nasional yaitu:

- Cita-cita Nasional: Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur
- Tujuan Nasional: meliputi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

d) Kepentingan Nasional Utama (*Main National Interest*)

- Tetap tegaknya NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
- Identitas dan integritas nasional.
- Berhasilnya pembangunan nasional.

• Bersikap sebagai Negarawan

Bersikap sebagai negarawan harus berlandaskan pada nusantara yang merupakan wawasan nasional Indonesia yaitu:

a) Mawas ke dalam

Mengutamakan persatuan dan kesatuan dan menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup bangsa.

b) Mawas ke luar

Menjamin kepentingan nasional Indonesia dan ikut serta memelihara ketertiban dan perdamaian dunia yang adil. Seorang negarawan hendaknya dapat bersikap meletakkan kepentingan nasional di atas kepentingan pribadi/ kelompok daerah, disertai kesadaran bela negara dan patriotisme/jiwa dan semangat juang yang tinggi.

• Bertindak sebagai Negarawan

Bertindak sebagai negarawan harus berlandaskan atau berpedoman pada

konsep ketahanan nasional dalam penyelenggaraan kehidupan nasional dan pembangunan nasional juga dinamakan pendekatan ketahanan nasional yang memiliki asas:

- a) Pendekatan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi dan selaras (harmonis)
- b) Holistik, komprehensif integral (utuh, menyeluruh, dan terpadu)
- c) Hirarki (saling keterkaitan)
- d) Mawas ke dalam dan ke luar
- e) Kekeluargaan dan Kebersamaan

Penerapan konsep ketahanan nasional akan menghasilkan ketahanan nasional yang memiliki sifat-sifat:

- Dinamis
- Wibawa
- Konsultasi dan kerjasama
- Mandiri

Selain konsep ketahanan nasional, sebagai negarawan juga harus bertindak secara konsisten dengan mengacu pada Pancasila, dan UUD NRI 1945 yang dirumuskan dalam rangka mencapai tujuan nasional dan mewujudkan cita-cita nasional.

b. Sosok dan Karakteristik Seorang Negarawan

Dengan demikian siapa saja yang termasuk dalam kategori pimpinan tingkat nasional (*the national leaders*) harus memahami dan sanggup untuk meng-

hadapi dan mengatasi kompleksitas permasalahan nasional di atas, dalam hal ini persoalannya tidak akan berhenti pada kesanggupan dan tekad semata-mata. Di sinilah seseorang akan diuji kualitas kepemimpinan (*leadership*) dan kenegarawannya (*statesmanship*).

Leadership secara mendasar dan konseptual berbeda dari *Statesmanship*. Seorang pemimpin harus banyak mempunyai karakter yang luar biasa (*the leader is a much more ordinary character*). "*Leadership*" merupakan "*a learned skill and competence*", yang dibutuhkan dalam hal ini ada 2 yaitu: • *Vision*, untuk memprediksi apa yang diharapkan oleh organisasi di masa depan dan bagaimana untuk mencapainya secara lebih cepat/efisien. Untuk bisa memprediksi, maka dibutuhkan beberapa teori dan konsep yang merupakan hasil kontemplasi dan memiliki fungsi-fungsi: "*To Describe*," "*To Explain*"; and "*To Predict*"; dengan demikian untuk kepentingan organisasi dan manajemen yang prima, harus terjadi kombinasi antara teori atas dasar a *sound, knowledge; action and skill*; dan • *Sympathy*.

Di era yang penuh turbulensi ini, dikatakan bahwa "*leadership is very critical*" (genting), karena seorang pemimpin harus bekerja secara efektif dalam kompleksitas permasalahan yang lintas sektoral dan global, "*Statesmanship*"

sebaliknya hanya dimiliki oleh manusia perkecualian atau manusia istimewa yang merupakan "*a great man*" yaitu seorang yang memiliki karakter khusus, yang lebih dari sekedar seorang pemimpin (*leader*).

Dengan mengkaji sejarah dan otobiografi pelbagai orang besar di dunia seperti: Adolf Hitler, Winston Churchill, Lee Kuan Yew, Dalai Lama, Albert Einstein, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela, Joseph Stalin, Jawaharalal Nehru, Soekarno, Mahatir Mohammad, dan lain-lain. Maka dapat di inventarisasi pelbagai karakteristik seorang negarawan, dengan catatan bahwa orang-orang terkenal tersebut tidak semuanya dapat dikategorikan sebagai seorang negarawan (*statesman*) dan hal ini semakin penting saat ini, karena di era globalisasi saling ketergantungan antara bangsa-bangsa di dunia semakin besar, sehingga prinsip-prinsip kepemimpinan semakin mengglobal. Generalisasi pelbagai karakter yang "*extraordinary*" dari seorang negarawan tersebut adalah sebagai berikut:

- Berbudi luhur (*magnanimity*);
- Memiliki visi yang jelas (*clear vision*);
- Bijaksana (*excellence virtues*);
- Teguh hati (*courageous, versed in the principle*);
- Rasa keadilan (*sense of justice*) yang tinggi;

- Memiliki prediksi jauh ke depan (*futureologist*), tidak sekedar reaktif, tetapi juga proaktif dan antisipatif;
 - Memiliki "extraordinary capability";
 - Memiliki karya monumental yang relatif langgeng dan bersifat universal;
 - Cinta damai, anti kekerasan, toleran dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan;
 - Memiliki keuletan (*tenacity*);
 - Bermartabat (*dignified*);
 - Berjiwa besar/legowo;
 - Diakui dan dihormati oleh masyarakat, nasional dan internasional;
 - Demokratis dan menjunjung tinggi nilai-nilai HAM;
 - Memiliki keberanian (*bravery, courage*);
 - Non partisan dalam memperjuangkan masalah-masalah yang menyangkut kepentingan atau kesejahteraan umum;
 - Menunjukkan kebijaksanaan, kearifan, "skiff" dan visi yang luas (*bold vision*) di dalam menjalankan tugas-tugas kenegaraan dan dalam menangani masalah-masalah publik;
 - Selalu berfikir strategis dan tidak ragu-ragu atau tegas dalam keadaan kritis untuk menentukan langkah-langkah yang signifikan (*decisive*);
 - Selalu "energetic" dan tak kenai menyerah;
 - Selalu mendemonstrasikan "*intellectual honesty*" dan tidak pernah bertolak ukur ganda;
 - Selalu berfikir sistemik (*system thinker: wholism, openness, interrelatedness, value transformation, control mechanism*);
 - Tidak pernah bertolak ukur ganda (*a single standard of conduct*);
 - Setia pada nilai absolut yang universal bahwa setiap orang harus memperlakukan orang lain seperti memperlakukan dirinya sendiri;
 - Selalu konsisten antara idealisme dan perbuatan;
 - Selalu menjaga integritas atas dasar moralitas yang tinggi. (*integrity=inner sense of "wholeness" deriving from honesty and consistent uprightness of character*);
 - Keterikatan (*attachments*) akan dianggap sebagai hal yang mempersulit untuk setia kepada standard moral yang tinggi (contoh: kepemilikan, kekuasaan, hak-hak istimewa);
 - Selalu terbuka dalam pengambilan keputusan dan meminimalkan kerahasiaan;
 - Sederhana, rendah hati (*humble*).
- c. Indeks Kepemimpinan Nasional Indonesia (IKNI)
- Dalam menghadapi Pemilu 2009, baik Pemilu Legislatif tanggal 9 April 2009 dan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tanggal 8 Juli 2009 Lemhannas RI telah merumuskan Indeks Kepemimpinan Na-

sional Indonesia (IKNI) atau *Indonesian Nasional Leadership Indexs* (INLI) yang mengandung 4 kategori Cita Susila dan Akuntabilitas, (juga untuk menghadapi pemilu tahun 2014) yaitu;

- Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Individual.
- Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Sosial.
- Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Institusional.
- Indeks Moralitas dan Akuntabilitas Global.

Dengan harapan semoga bangsa ini segera mendapatkan calon-calon pemimpin nasional yang tidak saja pemimpin yang kuat (*Strong Leader*) sebagai perpaduan karakter manager pemimpin (*leader*) dan negarawan (*statesman*) dengan standar internasional tetapi juga merupakan personal "*good leader*" yang berwawasan kebangsaan.

Pilpres 2009, telah berakhir dengan aman, lancar dan sukses meskipun ada beberapa catatan, yang telah menghasilkan pasangan SBY-BOEDIONO dengan perolehan suara 73.874.562 suara setara dengan 60.80% yang telah mendapat kepercayaan dan mandat rakyat sebagai Presiden dan Wakil Presiden 2009-2014. Kriteria atau jabaran IKNI adalah sebagai berikut;

- Indeks Moralitas dan Akuntabilitas

Individual;

- Sehat Jasmani dan rohani.
- Memiliki etika dan nilai-nilai personal yang jelas.
- Memiliki nilai kejujuran dan integritas yang tinggi.
- Kredibel, kapabel pemberani serta berwawasan IPTEK dan IMTAQ.
- Memiliki tingkat kecerdasan yang memadai dan pendidikan yang cukup.
- Mampu menyampaikan pemikiran-pemikiran yang jernih dengan orang lain.
- Penampilan dalam kampanye dan pidato yang meyakinkan.
- Dapat memadukan secara serasi *Hard and Soft Power*.
- Memiliki keluarga yang harmonis.
- Selalu bersikap meredahkan diri (*low profile*).

- Indeks Moralitas & Akuntabilitas Sosial ;

- Mampu berinteraksi secara baik dengan lingkungan sekitarnya.
- Dapat membangun simpati dan dapat diterima oleh masyarakat.
- Selalu bertanggungjawab dan dapat dipercaya.
- Disukai, profesional dan dapat membawa harapan baru.
- Dapat menghormati dan meng-

- menghargai pemikiran orang lain.
 - Dapat berkomunikasi dengan baik.
 - Mampu menumbuhkan optimism masyarakat, membangun kerjasama dan berkomunikasi dengan siapa-siapa.
 - Memilih semangat untuk menciptakan kader dan kehadirannya selalu lebih bersifat fungsional.
 - Mampu menggali karakter kepemimpinan yang bersumber dari nilai-nilai agama dan budaya bangsa Indonesia.
 - Kedudukan dalam survei akseptabilitas.
 - Tingkat dukungan lintas partai/golongan.
- Indeks Moralitas & Akuntabilitas Insitutional
 - Selalu sadar bahwa ruang gerak PIMNAS dibatasi oleh Konstitusi dan Perundang-undangan dalam kehidupan Negara.
 - Bersifat transparan akuntabel dan responsive.
 - Setia pada ideologi Pancasila & Konstitusi UUD 1945.
 - Konsisten terhadap CITANAS & TUNAS yang berwawasan sadar terhadap konsep TANNAS yang sistemik dan komprehensif integral.
 - Mentaati segala konsensus dasar bangsa.
 - Selalu peduli dan menghormati nilai-nilai demokrasi.
 - Tidak berpikir dan bertindak feodalistik.
 - Selalu sadar terhadap dinamika politik bangsa dan menjunjung tinggi supremasi hukum dan HAM kesetaraan gender).
 - Visioner dengan konsep dan pemikiran baru.
 - Mampu meningkatkan kinerja dalam kondisi krisis dan kritis dengan keputusan yang tegas, tepat dan disiplin.
 - Rekam jejak pada jabatan politik sebelumnya.
 - Mampu mengembangkan keunggulan pribadi untuk berpikir outside the box.
 - Mampu berpikir transformasional dengan visi yang jelas.
 - Mampu memberikan inspirasi, stimulasi dan selalu membangun serta mengarahkan sub sistem kepentingan yang dibentuknya.
- Indeks Moralitas & Akuntabilitas Global :
 - Memiliki wawasan regional dan global (*think globally act locally globalization*) dengan semangat membangun kepemimpinan bersama (*sharing/leardership*).
 - Selalu menjaga semangat ke-mitraan dengan menghormati

keragaman budaya (*cultural diversity*).

- Wawasan (*perception/insight*) dalam politik luar negeri yang bebas aktif dan disertai karakter negarawan yang karya dan kepribadiannya dihormati Negara lain.
- Memiliki kesadaran terhadap bahaya keamanan yang komprehensif.
- Selalu peduli untuk mengembangkan keunggulan IPTEK.

Kilas Balik Pelaksanaan Pemilu ke Pemilu dari Masa ke Masa

Dari Perjalanan Pemilu Tahun 1955 s/d Pemilu 2009 dengan segala keberhasilan dan kekeurangan-kekurangan disana-sini, pelaksanaan Pemilu 2004, terlebih pada saat Pilpres, baik putaran I & II yang untuk pertama kali 59 Tahun sejarah Indonesia rakyat memilih secara langsung Presiden dan Wakil Presiden sebagai Pemimpin Nasional yang berlangsung dengan asas LUBER & JURDIL, yang terlaksana dengan aman, tertib, dan lancar.

- Pemilu Legislatif tanggal 5 April 2004 yang diikuti 24 Parpol mencatat hasil 6 Parpol (Partai Golkar, PDIP, PKB, PAN, PPP, dan PBB) dinyatakan secara otomatis ikut pemilu karena lolos *electoral threshold*, sedangkan Pilpres putaran I, yang

dilaksanakan pada tanggal 5 Juli 2004 yang diikuti 5 pasangan Capres dan Cawapres, yaitu:

1. Wiranto+Salahudin Wahid= 23, 8%
2. Megawati Soekarno Putri+Hasyim Muzadi= 24,9%
3. Amien Rais+Siswono YH= 14,6%
4. SBY+JK= 33%
5. Hamzah Haz+Agum Gumelar= 2,9%

(Sumber *Quick Count-LP3ES-NDI*)

Mencatat hasil sebagai berikut:

1. SBY+JK=32,9%
2. Megawati SP+Hasyim Muzadi=24,9%, berhak maju Pilpres putaran II pada tanggal 20 September 2004 dengan hasil sebagai berikut:

- SBY+JK=69.266.350 suara=60,62%
- Megawati SP+Hasyim Muzadi= 44. 990.704 suara= 39,38%.

Dengan demikian hasil akhirnya adalah pasangan Calon Presiden+Calon Wakil Presiden, adalah SBY+JK ditetapkan sebagai Presiden+Wakil Presiden 2004-2009 yang telah dilantik pada Tanggal 20 Oktober 2004.

- Hasil Pemilu Tahun 2009

Setelah 14 hari (26 April 2009–9 Mei 2009) melaksanakan rekapitulasi penghitungan suara secara nasional, akhirnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu) 2009 pada

Sabtu Malam (9/5). Pada rapat pleno terbuka yang dipimpin Ketua KPU A. Hafiz Anshary dan dihadiri semua anggota KPU, Ketua dan anggota Bawaslu, dan saksi serta perwakilan peserta Pemilu 2009, KPU menetapkan perolehan suara 38 partai politik nasional dan perolehan suara calon anggota DPD.

Ketua KPU A. Hafiz Anshary membacakan satu persatu perolehan suara sah partai politik peserta Pemilu 2009. Total suara sah untuk Pemilu Anggota DPR yang berasal dari 33 Provinsi (77 daerah pemilihan) adalah sebanyak 104.099.785. (untuk detail perolehan lihat tabel Hasil Perolehan Suara Parpol Peserta Pemilu 2009).

Pemilihan Umum Presiden 08 Juli 2009			
Calon	SBY	MEGA SP	JK
Partai	DEMOKRAT	PDI-P	GOLKAR
Pasangan	Boediono	Prabowo S	Wiranto
Jumlah Suara	73,874,562	32,548,105	15,081,814
Presentasi	60.80%	26.79%	12.41%

Setelah membacakan perolehan suara partai Politik Peserta Pemilu 2009, secara bergantian anggota KPU membacakan perolehan suara calon anggota DPD di 33 Provinsi. Dari 38 partai politik nasional, hanya 9 partai yang memenuhi ambang batas perolehan suara 2,5 persen. Sementara 29 partai lainnya harus tersingkir. Berikut perolehan 9 partai politik tersebut secara lengkap.

1. Partai Demokrat 21.703.137 suara (20,85%)
2. Partai Golkar 15.037.757 suara (14,45%)
3. PDI P 14.600.091 suara (14,03%)
4. PKS 8.206.955 suara (7,88%)

5. PAN 6.254.580 suara (6,01%)
6. PPP 5.533.214 suara (5,32%)
7. PKB 5.146.122 suara (4,94%)
8. Gerindra 4.646.406 suara (4,46%)
9. Hanura 3.922.870 suara (3,77%)

Total Suara Sah Nasional: 104.099.785 suara. (ful) Kategori Berita: Pemilu 2009 Tagged: Hasil Pemilu Legislatif 2009.

Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia Tahun 2009 (biasa disingkat **Pilpres 2009**) diselenggarakan untuk memilih *Presiden* dan *Wakil*

Presiden Indonesia periode 2009-2014. Pemilihan suara diselenggarakan pada 8 Juli 2009. Pasangan *Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono* berhasil menjadi pemenang dalam satu putaran langsung dengan memperoleh suara 60,80%, mengalahkan pasangan *Megawati Soekarnoputri-Prabowo Subianto* dan *Muhammad Jusuf Kalla-Wiranto*.

a. Harapan Pelaksanaan Pemilu Tahun 2014

Sebelum menguraikan pelaksanaan Pemilu tahun 2014 yang akan datang terlebih dulu Penulis mengilustrasikan pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta yang dilaksanakan pada hari Kamis, 20 September 2012 sebagai berikut :

➤ Pilkada DKI Jakarta putaran I, pada tanggal 11 Juli 2012, yang diikuti 6 pasangan calon GUB+WAGUB, (Fauzi Bowo dan Nachrowi Ramli; Alex Noerdin dan Nono Sampono; Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama; Hidayat Nur Wahid dan Didik J Rachbini; Hendarji Soepandji dan Ahmad Riza; Faisal Basri dan Biem Benyamin), baik yang berasal dari Parpol dan independen, telah menghasilkan 2 pasangan calon yang berhak maju pada putaran II, yaitu pasangan Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama (JOKOWI-BASUKI) dan pasangan Fauzi-Bowo-Nachrowi Ramli (FOKE-NARA).

➤ Penyelenggaraan Pilkada DKI Jakarta putaran ke II, pada hari Kamis, 20 September 2012, telah berlangsung dengan lancar, tertib, aman, dan sukses serta dapat dijadikan barometer pelaksanaan Pilkada bagi Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia untuk masa yang akan datang serta acuan Pilpres 2014 kedepan.

Harapan rakyat dan warga Jakarta terwujud dengan tampilnya JOKOWI-BASUKI, yang dapat mengungguli pasangan *incumbent* FOKE-NARA, karena masyarakat Jakarta yang lebih rasional, cerdas yang menginginkan perubahan dan pembaharuan terhadap figure pemimpinnya, yang diharapkan mampu mewujudkan WAJAH BARU JAKARTA atau JAKARTA YANG BARU periode 2012-2017.

Hasil hitung cepat, (*quick count*) sementara dari beberapa lembaga survei, antara lain: oleh Lembaga Survei Indonesia, Lingkaran Survei Indonesia, Indo Barometer, Jaringan Suara Indonesia dan MNC Research, mencatat hasil pasangan JOKOWI-BASUKI telah mampu mengungguli pasangan FOKE-NARA.

Data hitung cepat dari Indo Barometer, mencatat hasil: 54, 11% untuk pasangan JOKOWI-BASUKI dan 45,89% untuk pasangan FOKE-NARA. Sedangkan catatan Kompas, Jumat 21 September

2012 merekam sebagai berikut: 52,97% untuk pasangan JOKOWI WIDODO-BASUKI TJAJAJA PURNAMA, dan 47,03% untuk pasangan FAUZI BOWO-NACHROWI RAMLI.

Terpilihnya pemimpin baru Jakarta (DKI I dan DKI II) periode 2012-2017 yaitu pasangan JOKOWI-BASUKI, adalah faktor figure dan kepercayaan warga Jakarta dalam menentukan pilihan pemimpinnya yang sederhana, rendah hati, pemimpin yang mampu menjadi pendengar yang baik bagi rakyatnya, pemimpin yang bersih, pemimpin yang memiliki segudang prestasi, yang diharapkan akan mampu melakukan perubahan dan pembaharuan kearah yang lebih baik bagi diidaman masyarakat Jakarta, yaitu "Jakarta baru, kota modern yang tertata rapi, menjadi tempat hunian yang layak dan manusiawi, memiliki masyarakat yang berkebudayaan dan dengan pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik".

Ini sekaligus membuktikan bahwa pesta demokrasi Pilkada Jakarta 2012, rakyat dan masyarakat Jakarta telah mampu melaksanakan hak politiknya, mampu berdemokrasi dengan LUBER dan JURDIL, yang sekaligus sebagai tanda KEMENANGAN WARGA JAKARTA, kemenangan JOKOWI-BASUKI yang akan membawa perubahan bagi kota Jakarta.

Hadirnya pemimpin yang melayani, pemimpin yang mampu menjadi pendengar yang baik, yang mengenal masyarakatnya, pemimpin yang bersih, pemimpin yang sederhana dan rendah hati, pemimpin yang akan melakukan perubahan kearah yang lebih baik, adalah impian dan harapan rakyat dan masyarakat Jakarta saat ini.

Yang menarik dari catatan penulis rakyat dan masyarakat kini memilih, YANG MUDA YANG AKAN BERKARYA, semoga berhasil membawa perubahan menuju Jakarta baru yang lebih baik.

- Dengan dibukanya sistem multi partai dalam pelaksanaan pesta demokrasi, lebih khusus menjelang pemilu 2014, tercatat ada 73 Parpol yang telah memiliki badan hukum yang tercatat pada KEMKUMHAM.

Dari 73 Parpol, hanya 46 Parpol yang sudah mendaftar ke KPU atas dasar hasil verifikasi KPU, yang sesuai aturan dan ketentuan yang telah ditetapkan, maka yang di nyatakan memenuhi syarat (17 item) sebagai peserta pemilu 2014 sejumlah 46 Parpol (ini masih bersifat sementara, tergantung hasil verifikasi administrasi dan verifikasi faktual dilapangan). Sebagai perbandingan peserta pemilu ke pemilu dari masa ke masa, adalah sebagai berikut:

1. Tahun 1955 - 29 Parpol
2. Tahun 1971 - 10 Parpol
3. Tahun 1977 - 3 Parpol
4. Tahun 1982 - 3 Parpol
5. Tahun 1987 - 3 Parpol
6. Tahun 1992 - 3 Parpol
7. Tahun 1997 - 3 Parpol
8. Tahun 1999 - 48 Parpol
9. Tahun 2004 - 24 Parpol
10. Tahun 2009 - 38 Parpol
11. Tahun 2014 - 46 Parpol ? (Semen-tara)

Setelah ditetapkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD, sebagai pengganti dan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008, diharapkan dapat mewujudkan Pemerintahan Presidensiil yang efektif serta mewujudkan Wakil-Wakil Rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya dan dapat menjalankan fungsi kelembagaan legislatif secara optimal melalui pelaksanaan pemilu yang lebih berkualitas dari waktu ke waktu.

Dalam pasal 1 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 dinyatakan bahwa "Kedaulatan berada ditangan rakyat dan di laksanakan menurut UUD NRI. Makna dari "KEDAULATAN BERADA DITANGAN RAKYAT" adalah bahwa rakyat memiliki kedaulatan, tanggungjawab, hak, dan kewajiban untuk secara demokratis MEMILIH PEMIMPIN yang akan membentuk pemerintahan guna mengurus dan melayani seluruh kegiatan

masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintahan, melalui pemilu yang berlandaskan kepada asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali (LUBER & JURDIL).

Pengertian memilih Pemimpin tiada lain adalah PEMIMPIN NASIONAL (PIMNAS) baik di tingkat Pusat (Presiden dan Wapres maupun ditingkat daerah (Gub+Wagub, Bupati+Wakil Bupati, Walikota+Wakil Walikota), serta para wakil-wakil rakyat baik DPR, DPD, & DPRD di tingkat Prov, Kab/ Kota.

Dalam UU No. 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wapres, pada Pasal 5 diatur persyaratan calon Presiden & calon Wapres.

Yang lebih menarik lagi yaitu dalam penjelasan atas Undang-Undang No. 42/2008, disebutkan bahwa disamping untuk menegaskan sistem presidensiil yang kuat dan efektif, dikandung maksud juga adanya basis dukungan dari DPR sebagai pemenang pemilu legislatif yang terdiri dari Parpol-Parpol.

Fungsi Parpol dalam NKRI yang majemuk dan berwawasan kebangsaan, adalah merupakan saluran memperjuangkan aspirasi masyarakat, sekaligus sebagai **Sarana Kaderisasi dan Rekrutmen Pemimpin** baik tingkat nasional maupun daerah ser-

ta untuk Rekrutmen Pimpinan berbagai komponen penyelenggara Negara. Hal ini mengindikasikan adanya koalisi permanen antara Parpol pemenang pemilu dalam mencalonkan Capres & Wapres.

Presiden dan Wapres terpilih sebagai PIMNAS adalah pemimpin bangsa yang harus memiliki integritas tinggi, menjunjung tinggi etika dan moral serta memiliki kapasitas dan kapabilitas yang baik, dengan harapan masyarakat, agar Presiden & Wapres terpilih tidak lagi merangkap jabatan sebagai pimpinan parpol yang mementingkan golongan atau kelompok tertentu, tetapi justru tugasnya adalah melayani rakyat dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan, sehingga CITANAS & TUNAS dapat segera tercapai dan terwujud.

Oleh karena itu, semoga PEMILU 2014 mampu memilih PIMNAS yang berkualitas, *strong leadership*, memenuhi kriteria negarawan, memenuhi persyaratan IKNI, dan memenuhi syarat sebagai *SERVANT LEADERSHIP* (Pemimpin yang melayani masyarakat bangsanya) yang juga sebagai *VISIONER LEADERSHIP* (Pemimpin yang memiliki visi jauh kedepan).

PENUTUP

Pada akhirnya, menurut pendapat penulis, perjalanan bangsa Indonesia menuju masyarakat yang adil dan makmur, adalah

sebuah perjuangan yang menuntut keseriusan semua pemimpin dan jajarannya untuk bekerja keras menangani berbagai permasalahan bangsa dan tantangan global yang sedemikian rumit.

Kondisi Bangsa kita saat ini sedang menghadapi ujian yang sangat dahsyat, bukan karena hanya krisis multidimensional yang belum juga terselesaikan, tetapi menyangkut pula hilangnya ketauladanan, sifat panutan dari para pemimpinnya. Banyak kita saksikan para pemimpin bangsa ini tidak satu hati dengan perkataannya, juga tidak satu kata dengan perbuatannya. Bangsa ini sesungguhnya telah kehilangan tauladan dari sang pemimpinnya. Kapan lahirnya generasi tauladan? Hadist Nabi Muhammad SAW, menyatakan: *Mulailah dari dirimu sendiri, kemudian dari keluargamu*" Wawasan ini dikenal dengan wawasan IBDA BINAFSIK yaitu mulailah atau ajaklah dirimu sendiri terlebih dahulu sebelum mengajak orang lain atau didiklah dirimu sendiri sebelum mendidik orang lain, Pimpinlah dirimu sendiri sebelum Memimpin orang lain.

Generasi Tauladan adalah generasi yang tidak hanya memiliki komitmen terhadap moral dan etika serta kompetensi, tetapi juga memiliki karakter. Generasi Tauladan adalah mereka yang mempunyai komitmen keber-IMAN-an dan mempunyai tekad untuk mencerdaskan dirinya.

"Allah akan meninggikan derajat orang yang beriman dan berilmu" demikianlah janji Allah kepada Generasi Tauladan.

Proses perubahan dapat dilakukan mulai dari tahapan peningkatan kualitas dan peran para pimpinan dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya masing-masing secara profesional mewujudkan kondisi pemerintahan yang baik (*Good Governance*) menuju pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*Clean Government*).

Kondisi pemerintahan dengan kualitas aparatur yang baik dapat dicapai jika upaya pemberdayaan segenap aparatur pemerintah diimbangi dengan upaya aktualisasi nilai-nilai kepemimpinan, keteladanan, integritas moral dan etika segenap pimpinan baik dari tingkat bawah sampai pada tingkat pimpinan puncak nasional.

Sosok pemimpin tauladan adalah sosok pemimpin yang mampu menyelenggarakan tugas dan fungsinya sebagai pemimpin serta memiliki daya kenegarawanan dan ketauladanan. Tipe pemimpin tauladan yang demikian, adalah pemimpin yang memenuhi 4 pilar suri tauladan para Nabi dan Rosul (menurut Islam) yaitu:

1. Siddik, yaitu jujur, benar berintegritas tinggi dan terjaga dari kesalahan.
2. Amanah, yaitu dapat dipercaya, memiliki legitimasi dan akuntabel.

3. Tabligh, yaitu senantiasa menyampaikan risalah kebenaran, tidak pernah menyembunyikan yang wajib disampaikan.

4. Fathonah, yaitu cerdas, memiliki intelektualitas yang tinggi dan profesional.

Pendapat diatas senada dengan yang diungkapkan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono X yang menyatakan bahwa syarat mutlak bagi kepemimpinan nasional yang kuat dan berwibawa, yang mampu mengantarkan bangsa ini menuju pemulihan kehidupan bangsa yang lebih bermutu adalah mengimplementasikan TRILOGI KEPEMIMPINAN yang terdiri dari: ketauladanan, kemauan (*political will*) dan kompetensi. Dan rasanya penting untuk diingat sesanti dari Sri Sultan Hamengku Buwono X: "Setiap kita sesungguhnya memiliki kapasitas untuk menjadi pemimpin. Kekuatan terdahsyat seorang pemimpin adalah keteladanan dan kejujurannya (*siddiq*)"

Marilah kita semua, sesuai dengan jenjang dan proporsinya untuk selalu mempunyai etos kerja 6AS+1AS yaitu kerja keras, kerja cerdas, kerja berkualitas, kerja dengan loyalitas, kerja ikhlas, kerja tuntas, dan kerja penuh dengan integritas yang berpedoman pada 3 TIF yaitu Positif, Kontributif dan Produktif.

Demikianlah mimpi-mimpi dan harapan rakyat terhadap kriteria kualitas PIMNAS

masa depan dalam menghadapi PEMILU 2014 agar mampu membawa bangsa dan Negara dalam mewujudkan CITANAS dan TUNAS.

Maju terus pantang mundur. Rawe-rawe rantas malang-malang putung. Bersama kita bisa dan indahny kebersamaan. □

DAFTAR PUSTAKA

- Adam Ibrahim Indrawijaya & Wahyu Suprpti, (2001), *Kepemimpinan Dalam Organisasi*, Lembaga Administrasi Negara RI Jakarta.
- Ambar Teguh Sulistiyani, (2004), *Memahami Good Governance Dalam Perspektif SDM*, Gava Media, Yogyakarta.
- Andrias Harefa, (2005), *Menjadi Manusia Pembelajar (On Becoming A Learner)*, Kompas, Jakarta.
- Bernardine R. Wirjana, M.S.W. & Susilo Supardo, M.Hum. (2002), *Kepemimpinan, (Dasar-dasar dan Pengembangannya)* ANDI, Yogyakarta.
- Cohen, William A, (2004), *The Art of the Strategist, 10 Essential Principles for Leading Your Company to Victory*, Library of Congress.
- Covey SR, (1992), *"Principle Centered Leadership," A Fire Side Book*, Simon end Schuster, New York.
- Dale Carnegie & Associates, Inc., (1996), *Pemimpin Dalam Diri Anda*, Mitra Utama, Jakarta.
- David Osborne end Ted Gacbler (1992), *Reinventing Government*.
- Drucker, Peter F., *Innovation and Entrepreneurship*, Harper Business, New York, 1995.
- Farid Poniman, Indra Nugroho, Jamil Az-zaini, (2005), *Kubik Leadership*, Hikmah (PT. Mizan Publika), Jakarta.
- H.A.R.Tilaar. (1997). *Pengembangan Sumber Daya Manusia Dalam Era Globalisasi*, Grasindo, Jakarta.
- Hadari Nawawi, H. dan M. Martini Hadari, (1995), *Kepemimpinan Yang Efektif*, UGM. Cet. II, Yogyakarta.
- Hamengku Buwono X, (2004), *Sosok Pemimpin Nasional Yang Visioner, Konsisten, Tegas dan Tidak Ambivalen*, (Konvensi Nasional II Tahun 2004 IKAL), Yogyakarta.
- Herman Musakabe, (2004), *Mencari Kepemimpinan Sejati di Tengah Krisis dan Reformasi*, Citra Insan Pembaru, Jakarta.
- J. Winardi, (2005), *Manajemen Perubahan (Management of Change)*, Prenada Media, Jakarta.
- Jalaludin Rakhmat, (2006), *Belajar Cerdas (Belajar Berbasis Otak)*, Mizan Learning Center (MLC), Bandung.
- James M. Kouzes & Barry Z. Posner, (2006), *5 Teladan Kepemimpinan*, PT. Bhuana Ilmu Populer Kelompok Gramedia, Jakarta.
- John Adair, (2007), *Cara Menumbuhkan Pemimpin (7 prinsip kunci) Pengembangan Kepemimpinan Yang Efektif*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- John C. Maxwell, (1995). *Mengembangkan Kepemimpinan Di Dalam Diri Anda*.

- Binarupa Aksara, Jakarta.
- John Naisbitt, (1996), *Megatrens Asia*, Delapan Megatrend Asia Yang Mengubah Dunia, alih bahasa: Danan Priyatmoko, Wandi S. Brata, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Jokó Widodo, (2002). *Good Governance* (Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi), Insan Cendekia, Surabaya.
- Konvensi Nasional Ikal II, Sosok Kepemimpinan Nasional 2004–2009, Yogyakarta, 31 Januari 2004.
- Lembaga Administrasi Negara (LAN), (2005), *Paradigma Kepemimpinan*, Pusdiklat SPIMNAS Bidang Kepemimpinan, LAN-RI, Jakarta.
- Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhannas RI), (2008), *Kepemimpinan Modul I, Modul II, Modul III dan Modul IV*
- Maxwell, John. C. *The 21 Irrefutable Laws of Leadership*, Thomas Nelson Publishers, Nashville, 1998.
- Miftah Thoha, (1983), *Kepemimpinan dalam Manajemen*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Muchlas, M (2005) "Perilaku Organisasi", Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Muladi, (2007), *Postur Kepemimpinan dan Kenegarawanan serta Perannya dalam Pembangunan dan Program Kemanusiaan*, Lemhannas RI, Jakarta.
- Peter M. Senge, (1997), *The Fifth Discipline, The Art And Practice Of The Learning Organization*, Century Business, London,.
- Rhenald Kasali, (2007), *Re-Code (Your Change DNA) Membebaskan Belenggu-Belenggu Untuk Meraih Keberanian dan Keberhasilan Dalam Pembaharuan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Robbins, Stephen. P., & Mary Coulter, (1999). *Management (Sixth Edition)*. Prentice Hall, Inc. Englewood Cliffs, NJ 07632.
- Robbins, Stepen. P (1993) "*Organizational Behavior*", ED-6, Prentice Hall, New York.
- Robert K. Greenleaf, (1977), *Servant Leadership*, ED-6, Prentice Hall, New York.
- Sedarmayanti, (2003), *Good Governance Dalam Rangka Otonomi Daerah; Upaya membangun Organisasi Efektif dan Efisien melalui Restrukturisasi dan Pemberdayaan*, Mandar Maju, Bandung.
- Soebagio Sastrodiningrat, (1999), *Kapita Selekta Manajemen & Kepemimpinan*, IND-HILL-CO, Jakarta.
- Soedarsono, Soemarno, (2005), *Hasrat Untuk Berubah*, PT. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- SHM Lerrick, Mayjen (Purn), *Strategi Kepemimpinan Nasional Di Era Keterbukaan*.
- Sujatno, Adi, (1997), *Kepemimpinan Nasional Dalam Rangka Meningkatkan Kesadaran dan Ketaatan Hukum (Kertas Karya Perorangan Kursus Reguler Angkatan XXX)*.
- _____, (2003), *Kepemimpinan Nasional*, LEMHANNAS, Jakarta,
- _____, (2005), *Moral dan Etika PNS*, Jakarta.
- _____, (2005), *Etika Kepemimpinan Aparatur*, Jakarta.

- _____. (2005), Aktualisasi Nilai-Nilai Kepemimpinan dan Peran Pemimpin Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*).
- _____. (2006), Kapita Selekta seri Kepemimpinan, Lemhannas RI, Jakarta.
- _____. (2007), Moral dan Etika Kepemimpinan Merupakan Landasan Ke Arah Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*), Jakarta.
- _____. (2008), Pencerahan Dibalik Penjara versi Kepemimpinan.
- Sujatno, Adi, dan Muladi, (2008), Traktat Etis Kepemimpinan Nasional.
- _____. (2009), Pencerahan Kepemimpinan Di Balik Penjara.
- _____. (2009), Aspek Kepribadian dan Karakter Kepemimpinan Mahasiswa Menjawab Tantangan Zaman.
- _____. (2009), Kriteria Kepemimpinan Nasional dan Wakil-wakil Rakyat Dalam Menghadapi Tantangan Global.
- _____. (2009), Teori-Teori Kepemimpinan.
- _____. (2009), Kepemimpinan KORPRI Dalam Menghadapi Tantangan Zaman.
- _____. (2011), Kepemimpinan PWRI Menjawab Tantangan Global; Lemhannas RI.
- _____. (2012), Traktat Etis PIMNAS, Edisi Revisi.
- Suradinata, Ermaya, (2002), Manajemen Pemerintahan Dalam Ilmu Pemerintahan, PT. Vidcodata, Jakarta.
- Surya Dharma, (2005), Manajemen Kinerja, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Taliduh Ndraha, (1997), Metodologi Ilmu Pemerintahan, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- The Liang Gie, (1998), Kode Etik Bagi Pegawai Pemerintahan, Publik.
- Undang-Undang No. 42/2008 Tentang Pemilu Presiden dan Wapres.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD.
- Wahjo Sumidjo, (1999), Kepemimpinan Abad xxi, Lembaga Administrasi Negara, Jakarta.
- Warren Bennis & Burt Nanus, (2003), *LEADERS* (Strategi untuk Mengembangkan Tanggung Jawab), PT. Bhuana Ilmu Populer (BIP) Kelompok Gramedia, Jakarta.
- Yukl, G.A., (1989). *Leadership in Organizations*. 2d ed. Englewood Cliffs, N.J. : Prentice Hall.

